

INFLASI INTI DAN RESPON KEBIJAKAN MONETER

Oleh :

Sahminan

Peneliti Ekonomi Bank Indonesia

Tingginya inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2005 yang mencapai 17,11%, dan bahkan tertinggi sejak tahun 1999, membuat banyak kalangan mempertanyakan kemampuan Bank Indonesia (BI) dalam mengendalikan inflasi. Kesangsian itu dapat dipahami mengingat tugas utama BI adalah mengendalikan inflasi.

Apakah BI sebagai otoritas moneter memang seharusnya dapat mengendalikan inflasi IHK sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat?

Selain inflasi IHK sebenarnya inflasi mempunyai beberapa pengukuran, termasuk di antaranya adalah inflasi Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan inflasi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) *deflator*. Namun demikian, indikator yang paling umum digunakan dalam pengukuran inflasi adalah inflasi IHK karena inflasi IHK-lah yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas. Dalam kehidupan sehari-hari, inflasi IHK-lah yang secara langsung mempengaruhi keputusan bisnis dan konsumen. Dengan demikian, umumnya masyarakat melihat tugas BI mengendalikan inflasi identik dengan pengendalian inflasi IHK.

Meskipun telah tertanam di benak masyarakat luas bahwa BI melalui kebijakan moneter (seperti penentuan target suku bunga) seharusnya dapat mengendalikan inflasi IHK, pada kenyataannya banyak faktor yang mengakibatkan inflasi IHK di luar kendali kebijakan moneter. Hanya komponen-komponen tertentu dari inflasi IHK yang berada dalam kendali otoritas moneter. Untuk itu, sebagaimana juga yang dilakukan oleh otoritas moneter di banyak negara lain, BI telah berusaha memilah-milah komponen inflasi IHK ke dalam kelompok yang dapat dan tidak dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter. Inflasi yang dianggap dapat dikendalikan dengan kebijakan moneter lazim disebut dengan inflasi inti (*core inflation*).

Inflasi inti pada dasarnya merupakan suatu tingkat inflasi IHK setelah mengeluarkan bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi (*volatile foods*), dan barang-barang yang harganya banyak ditentukan pemerintah (*administered goods*). *Volatile foods* termasuk di antaranya beras, cabe, dan hasil-hasil pertanian lainnya, sementara itu *administered goods* termasuk diantaranya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1, inflasi inti dapat lebih tinggi ataupun lebih rendah dari inflasi IHK, tergantung pada kenaikan harga *volatile foods* dan *administered goods*. Sebagai contoh, pada tahun 2003 karena terjadinya penurunan harga *volatile foods* yang cukup besar, inflasi IHK cukup jauh berada di bawah inflasi inti. Sementara itu, dengan kenaikan harga BBM yang rata-rata di atas 100%, pada tahun 2005 inflasi IHK hampir dua kali lipat dari inflasi inti. Dalam kondisi tertentu, besarnya

inflasi IHK dapat juga sama dengan ataupun mendekati inflasi IHK, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2004.

Harga *volatile foods* dapat sangat berfluktuasi karena ketergantungan pasokannya yang sangat tinggi terhadap keadaan cuaca, musim, gangguan hama, dan distribusi. Sementara itu, harga *administered goods* seperti BBM dan listrik banyak ditentukan oleh pemerintah sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut cenderung bersifat sesaat. Dengan demikian, karena perubahan harga *volatile foods* dan *administered goods* lebih bersumber dari sisi pasokan dan cenderung bersifat sesaat, inflasi yang ditimbulkan oleh kedua kelompok barang tersebut jelas di luar kendali BI.

Bahwasanya kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi inflasi inti telah banyak ditunjukkan dalam model-model ekonomi, baik secara teoritis maupun secara empiris. Tanpa fluktuasi dari harga *volatile foods* dan *administered goods*, inflasi inti dapat dilihat sebagai inflasi yang berasal dari kebijakan moneter. Hasil penelitian di BI juga menunjukkan bahwa di Indonesia, dibandingkan dengan inflasi IHK, inflasi inti lebih dapat dikontrol dengan kebijakan moneter. Hal ini sangat beralasan karena jika harga *volatile foods* lebih ditentukan oleh gangguan terhadap pasokan, sementara harga *administered goods* ditentukan oleh pemerintah, maka kestabilan harga yang diukur dengan inflasi intilah yang berada dalam kendali BI.

Tentu saja, meskipun BI memfokuskan pada pengendalian inflasi inti, bukan berarti inflasi IHK diabaikan. BI tetap mengikuti perkembangan inflasi IHK dan menggunakannya dalam perumusan kebijakan moneter. Jika melalui inflasi inti, BI akan mengetahui kecenderungan inflasi yang bersifat jangka menengah dan panjang, maka melalui inflasi IHK, BI akan memperoleh informasi mengenai inflasi jangka pendek. Karena inflasi inti dapat juga dipengaruhi oleh kenaikan harga *volatile foods* dan *administered goods* melalui efek lanjutan (*second round effects*), perkembangan inflasi IHK yang lebih bersifat jangka pendek dapat memberikan gambaran terhadap perkembangan inflasi inti.

Grafik 1. Inflasi Inti dan Inflasi IHK

